

# Faktor Kinerja UMKM: Analisis Efek Mediasi Dukungan Pemerintah

**Egga Adillah<sup>1\*</sup>, Friska Aditya<sup>2</sup>, Aris Setiawan<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup>Akuntansi, Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia

Email: <sup>1)</sup> [eggaadillah@gmail.com](mailto:eggaadillah@gmail.com), <sup>2)</sup> [friskaaditya432@gmail.com](mailto:friskaaditya432@gmail.com), <sup>3)</sup> [arissetiawan@upb.ac.id](mailto:arissetiawan@upb.ac.id)

**Received : 22 January - 2025**

**Accepted : 26 February - 2025**

**Published online : 28 February - 2025**

## Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have a crucial impact on the economic progress of numerous nations, particularly in developing regions. Acting as the cornerstone of the local economy, MSMEs are vital in propelling economic advancement. They make substantial contributions to job creation, revenue generation, and the overall economic progress. Nonetheless, despite their significance, MSMEs frequently encounter a range of obstacles that impact their financial viability and ongoing survival. This study delves into an in-depth examination of how the financial performance of MSMEs can be enhanced through Financial Digitalisation, Financial Inclusion, and Access to Capital, with a particular focus on the pivotal role of government support as a strengthening factor in this relationship. The research methodology employed in this investigation is quantitative, employing a sample of MSMEs located in Pontianak City. Data analysis was conducted using the Structural Equation Model (SEM) and tested with the Smart PLS statistical tool. The findings suggest that financial digitalisation and access to capital positively influence the performance of MSMEs, with government support acting as a mediator. However, government support is not able to mediate the impact between Financial Inclusion and MSME performance.

**Keywords:** Access Capital, Financial Digitalization, Financial Inclusion, Government Support.

## Abstrak

Peran penting UMKM dalam perekonomian banyak negara, terutama di negara-negara berkembang, tidak dapat diabaikan. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan berperan besar dalam memacu kemajuan ekonomi. Mereka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, meskipun penting, UMKM sering menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja keuangan dan keberlanjutan jangka panjang usaha. Penelitian ini telah melakukan analisis detail mengenai cara Digitalisasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Akses terhadap Modal meningkatkan kinerja keuangan UMKM, dengan mempertimbangkan pentingnya dukungan pemerintah dalam memperkuat hubungan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan fokus pada UMKM di Kota Pontianak. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Model (SEM) yang diuji dengan Smart PLS. Temuan penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan dan akses terhadap Modal memiliki dampak positif terhadap kinerja UMKM melalui dukungan pemerintah sebagai mediator. Namun, dukungan pemerintah tidak dapat memfasilitasi hubungan antara Inklusi Keuangan dan kinerja UMKM.

**Keywords:** Akses Modal, Digitalisasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Dukungan Pemerintah.

## 1. Pendahuluan

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor UMKM pada Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 61% serta kontribusinya terhadap penyediaan lapangan kerja yang mencapai 97% dari total angkatan kerja (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023). Peran UMKM diharapkan semakin meningkat seiring dengan



keunggulan yang dimilikinya, sehingga mampu lebih menyerap banyak tenaga kerja dan mampu bertahan dalam menghadapi tantangan kondisi perekonomian negara yang masih sulit (Setiawan et al., 2024). UMKM di Kota Pontianak memiliki peran penting dalam pembangunan UMKM yang berkelanjutan, dengan pertumbuhan yang signifikan setiap tahun.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, jumlah UMKM di Kota Pontianak adalah 41.573. Pada tahun 2022, jumlahnya meningkat menjadi 41.878, dan pada tahun 2023, jumlah UMKM mencapai 43.247. Berdasarkan data tersebut, maka penting untuk menilai kinerja keuangan UMKM di Kota Pontianak agar dapat terus tumbuh secara berkelanjutan. Kinerja keuangan secara keseluruhan bertujuan untuk menilai keberhasilan dalam mencapai laba dan menilai potensi pertumbuhan usaha di masa depan (Adita et al., 2021). Kinerja keuangan UMKM mengacu pada kemampuan UMKM untuk beroperasi secara efisien, menghasilkan pendapatan yang memadai, bertahan hidup, dan tumbuh dengan mempertimbangkan peluang dan kondisi lingkungan. ancaman (Risal et al., 2019).

Di era digitalisasi yang pesat ini, UMKM harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk menangkap peluang yang dihadirkan oleh teknologi digital untuk pengembangan bisnis, memastikan keberlanjutan, dan memperluas jangkauan pasar (Hidayat et al., 2024). Kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan sektor keuangan menjadi lebih responsif, dan digitalisasi sangat penting bagi UMKM untuk tetap beradaptasi dalam situasi yang semakin maju (Purwantini & Amalia, 2021). Hal ini didukung oleh fakta bahwa perubahan digital telah mengubah secara berarti cara bisnis beroperasi, khususnya untuk perusahaan-perusahaan skala menengah dan kecil. Dunia digital telah mengubah cara UKM menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Hal ini juga membentuk kembali lanskap keuangan dan memberikan jalur baru untuk pertumbuhan dan kemakmuran (Gosal & Nainggolan, 2023). Disamping pertumbuhan digitalisasi yang pesat, Inklusi Keuangan dan akses terhadap Modal juga merupakan komponen vital dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM. Inklusi Keuangan mengacu pada akses individu atau perusahaan terhadap berbagai produk, layanan, dan lembaga keuangan (Kristiawati & Malini, 2024). Inklusi Keuangan memungkinkan untuk membuat UMKM mengakses berbagai layanan keuangan dengan biaya yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan kinerja UMKM (Kumar et al., 2020). Inklusi Keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu di masyarakat dan UMKM dapat memperoleh layanan keuangan seperti pinjaman, tabungan, asuransi, dan pembayaran yang semuanya penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bisnis jangka panjang. Kemajuan dalam layanan keuangan digital telah membawa kemudahan akses dan kenyamanan bagi semua, dan telah menjadi komponen vital dalam mencapai target keuangan yang inklusif (Sun & Zhang, 2024).

Kendala terbesar bagi perkembangan UKM dan kewirausahaan di negara-negara berkembang adalah terbatasnya akses keuangan (Sanga & Aziakpono, 2024). Orang yang memiliki pengetahuan dan kepercayaan diri dalam hal keuangan harus diberikan akses yang mudah ke institusi keuangan, produk, dan layanan yang tersedia (Kilay et al., 2022). Kebijakan pemerintah sangat penting untuk dipahami oleh UMKM, karena kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap kebijakan pemerintah saat ini dapat menyebabkan UMKM kehilangan akses terhadap dukungan pemerintah, sehingga mengakibatkan kemunduran dan hambatan terhadap pengembangan usaha.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa banyak UMKM kurang mampu menghadapi tantangan dalam memanfaatkan digitalisasi keuangan, memahami Inklusi keuangan, dan memperoleh akses terhadap Permodalan. Selain itu, dukungan pemerintah juga menjadi perhatian peneliti. Beberapa penelitian terdahulu yang

relevan dengan penelitian ini antara lain penelitian Hendratmoko (2021) yang menyatakan bahwa digitalisasi berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan UMKM. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut dan menganalisis dampak digitalisasi terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Pontianak.

Selain itu, studi digitalisasi Sofyan (2017) mengemukakan bahwa Inklusi keuangan memengaruhi kinerja UMKM. Sebaliknya, survei oleh Almaidah dan Endarwati (2019) menunjukkan bahwa Inklusi keuangan berdampak positif namun tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa studi-studi ini masih memiliki hasil yang tidak konsisten. Akses terhadap Modal dan dukungan pemerintah juga menjadi area fokus penulis, sebagaimana temuan oleh Sani et al. (2020) menunjukkan bahwa akses terhadap Modal berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Namun, temuan ini tidak sejalan dengan temuan (Setiawan et al., 2024). Selain itu, temuan oleh Tay et al. (2022) mengenai kebijakan pemerintah mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor UMKM, sedangkan temuan oleh Salam dan Prathama (2022) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak memengaruhi kinerja UMKM. Temuan ini masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Hasil signifikan mengenai dampak digitalisasi terhadap kinerja keuangan UMKM yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya mendorong peneliti untuk menganalisis lebih lanjut pengaruh digitalisasi terhadap UMKM di Kota Pontianak. Sementara itu, hasil yang tidak konsisten mengenai Inklusi keuangan, akses terhadap Modal, dan kebijakan pemerintah terhadap kinerja UMKM yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya mendorong peneliti untuk menyelidiki lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih konklusif pada variabel-variabel yang tidak konsisten ini.

Studi ini memberikan hal baru dengan mengeksplorasi peran mediasi dukungan pemerintah dalam hubungan antara faktor kinerja keuangan dan hasil keuangan UMKM, suatu area yang belum diselidiki secara luas dalam literatur sebelumnya. Meskipun sudah banyak penelitian yang melibatkan dampak positif dukungan pemerintah terhadap kinerja UMKM, hanya sedikit penelitian yang menginvestigasi bagaimana dukungan tersebut dapat menghubungkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja keuangan UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memberikan sudut pandang baru yang belum banyak dibahas sebelumnya. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan dalam mengevaluasi kebijakan dukungan yang diberikan kepada UMKM. Dengan memahami perannya, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan aktual UMKM, sehingga meningkatkan kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional secara keseluruhan.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Teori *Resource Based View* (RBV)

Dalam dunia bisnis yang penuh persaingan, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kompetitif sangatlah penting. Salah satu cara yang relevan untuk menggali teori ini adalah melalui teori pandangan berbasis sumber daya, yang pertama kali dirumuskan oleh Wernerfelt (1984). Teori RBV memandang bahwa sumber daya dan kemampuan perusahaan memainkan peran penting, karena menjadi dasar dari kemampuan daya saing serta kinerja perusahaan. Menurut Barney dan Arikan (2005), *Resource Based View* adalah konsep yang mengungkapkan bahwa perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya sehingga perusahaan dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Teori *Resource-Based View* (RBV) menyoroti signifikansi keberadaan sumber daya yang langka dan bernilai sebagai faktor mendasar dalam meraih keunggulan bersaing dan meningkatkan performa perusahaan. Pada skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sumber daya tersebut termasuk akses keuangan, inovasi teknologi, dan bantuan lembaga yang memadai. Keberhasilan dan keberlanjutan UMKM dapat dikaitkan dengan berbagai aset nyata dan tidak berwujud, termasuk keterampilan manajemen, modal sosial, dan teknologi digital (Dasuki, 2021).

Inklusi keuangan (*Financial Inclusion*), yang mencakup peningkatan akses terhadap layanan keuangan, merupakan elemen penting yang mendukung proses digitalisasi keuangan. Sebagai sumber daya strategis, digitalisasi keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan akses pasar. Penelitian mengungkap bahwa UMKM yang berhasil mengimplementasikan inovasi digital dengan baik dan memiliki kemampuan untuk mengakses layanan keuangan yang memadai memiliki kemungkinan lebih besar untuk sukses dalam persaingan. Dukungan kebijakan pemerintah yang mendorong adopsi teknologi serta inklusi keuangan bukan hanya membantu, tetapi menjadi esensial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan UMKM di era digital.

Dalam konteks ini, memiliki kemudahan untuk mendapatkan modal menjadi krusial. Teori RBV menyatakan bahwa memiliki sumber daya langka dan sulit untuk ditiru dapat memberikan keunggulan kompetitif yang besar. Dengan demikian, dukungan pemerintah yang memfasilitasi akses modal dengan biaya rendah dan syarat yang menguntungkan bukan sekadar kebijakan, tetapi juga strategi penting yang dapat meningkatkan kapasitas operasional dan potensi inovasi UMKM. Dukungan pemerintah berperan sebagai sumber daya eksternal yang memperkuat sumber daya internal UMKM. Dengan dukungan kebijakan pemerintah seperti pelatihan dan subsidi, UMKM dapat lebih efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola tantangan pasar. Secara keseluruhan, RBV menegaskan bahwa kombinasi dan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh UMKM akan menentukan kinerja mereka.

## 2.2. Pengembangan Hipotesis

### 2.2.1. Pengaruh Digitalisasi Keuangan terhadap Kinerja keuangan UMKM

Digitalisasi keuangan (*Financial Digitalization* (FD)) mencakup penggunaan teknologi digital yang digunakan untuk mempermudah proses mengelola transaksi keuangan, yang dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Hamdi (2023) menunjukkan bahwa dengan kemajuan digitalisasi keuangan, UMKM memiliki kemudahan dalam mengatur keuangan dengan cepat dan tepat. Dampak dari pengelolaan keuangan melalui digitalisasi secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan dan produk yang dalam usaha tersebut. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Kilay et al. (2022) menyatakan bahwa digitalisasi, UMKM dapat menikmati kemudahan dalam menggunakan layanan keuangan digital seperti e-payment dan e-commerce, yang berpotensi untuk memperluas pasar mereka. Temuan diatas menunjukkan bahwa selain mempermudah dalam pengelolaan keuangan usaha, penerapan digitalisasi keuangan berpotensi untuk meningkatkan akses UMKM terhadap layanan keuangan yang lebih luas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

**H1:** Digitalisasi keuangan (*Financial Digitalization* (FD)) berdampak positif terhadap kinerja UMKM (P.MSME).

### 2.2.2. Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM

Inklusi keuangan (*Financial Inclusion* (FI)) merujuk pada peningkatan akses terhadap layanan keuangan formal yang memungkinkan UMKM untuk mendapatkan modal, melakukan transaksi, dan mengelola keuangan dengan lebih efektif. Penelitian yang ditemukan oleh Hasanudin dan Panigfat (2024) menekankan bahwa inklusi keuangan tidak hanya memperluas akses terhadap modal, tetapi juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan bagi pelaku UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Trianto et al. (2021) menunjukkan bahwa inklusi finansial di kalangan UMKM di Pekanbaru sangat penting untuk meningkatkan bisnis mereka secara positif. UMKM yang memiliki akses ke lembaga keuangan formal cenderung lebih produktif dan kompetitif. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa inklusi finansial merupakan cara untuk memperluas akses UMKM ke layanan keuangan formal. Layanan ini tidak hanya memberikan modal, tetapi juga membantu dalam pemahaman dan pengelolaan keuangan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan performa bisnis secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>2</sub>:** Inklusi Keuangan (*Financial Inclusion* (FI)) berpengaruh Positif terhadap Kinerja UMKM (P.MSME).

### 2.2.3. Pengaruh Akses Permodalan terhadap Kinerja UMKM

Akses Permodalan (*Access to Capital* (AC)) merupakan bagaimana suatu usaha mendapat kemudahan dalam mengakses segala macam bentuk modal untuk mengembangkan ataupun mendirikan suatu usaha. Adanya akses permodalan yang memadai maka akan dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kinerja usaha dan mengembangkan usahanya. Penelitian oleh Novitasari et al. (2022) menunjukkan bahwa memperoleh dana dari institusi keuangan resmi memiliki dampak besar terhadap performa UMKM di wilayah Bogor. Penemuan ini menekankan betapa pentingnya akses permodalan yang memadai dalam membantu UMKM menghadapi tantangan seperti perubahan permintaan dan biaya operasional yang tinggi (Fajriah & Himawati, 2023). Kurangnya akses permodalan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut, maka rumusan hipotesis ketiga sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>:** Akses Permodalan (*Access to Capital* (AC)) berpengaruh Positif terhadap Kinerja UMKM (P.MSME).

### 2.2.4. Pengaruh Dukungan Pemerintah terhadap Kinerja UMKM

Dukungan pemerintah (*Government Support* (GS)) merupakan suatu kontribusi yang diberikan pemerintah untuk mendukung berjalannya dan berkembangnya suatu usaha. Dalam hal ini dukungan pemerintah dapat berupa berbagai bentuk seperti akses modal, pelatihan, insentif pajak, dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung UMKM. Penelitian Sugiri (2020) menunjukkan bahwa Selama masa pandemi COVID-19, berbagai tindakan telah diambil oleh pemerintah untuk memberikan dukungan kepada UMKM, termasuk kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan dan produktivitas sektor tersebut. Bukan hanya dalam hal pemulihan, namun juga terfokus pada pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pelaku usaha. Tindakan ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Suryaningrum dan Utami (2024) dukungan pemerintah daerah berperan penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di Yogyakarta. Studi ini menyoroti bahwa mutu layanan koperasi, dukungan pemerintah, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap daya saing UMKM, yang kemudian membawa dampak positif pada kinerja keuangan mereka Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan

UMKM. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

**H4:** Dukungan Pemerintah (Government Support (GS)) berpengaruh Positif terhadap Kinerja UMKM (P.MSME)

### **2.2.5. Pengaruh Digitalisasi Keuangan terhadap kinerja UMKM melalui dukungan pemerintah sebagai mediasi**

Digitalisasi keuangan merupakan penggunaan teknologi dalam usaha yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan UMKM. Penelitian yang dilakukan Manne (2022) menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi keuangan syariah memiliki efek yang signifikan pada kinerja keuangan UMKM, masih ada tantangan dalam memanfaatkannya secara penuh. Dukungan pemerintah berupa kebijakan yang mendorong akses ke teknologi digital, pelatihan, dan dukungan keuangan, penting untuk mendorong digitalisasi UMKM. Sebuah studi oleh Khotimah dan Budi (2020) menegaskan bahwa bantuan pemerintah berupa fasilitas infrastruktur dan akses ke dana sebagai upaya untuk meningkatkan keberhasilan UMKM terbilang penting. Sebuah studi oleh Tarigan et al. (2022) mengindikasikan bahwa meskipun dukungan kebijakan pemerintah penting, UMKM perlu beradaptasi dengan perubahan pasar melalui inovasi produk dan digitalisasi. Hal ini menandakan bahwa dukungan dari pemerintah bukan hanya sebagai pembantu, tetapi juga sebagai alat yang dapat membantu UMKM untuk menggunakan digitalisasi keuangan dengan efisien. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

**H5:** Digitalisasi Keuangan (FD) berdampak positif terhadap kinerja UMKM melalui dukungan pemerintah (GS) sebagai mediasi.

### **2.2.6. Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap kinerja UMKM melalui dukungan pemerintah sebagai mediasi**

Adanya akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan, didukung oleh kebijakan pemerintah yang tepat, dapat membantu UMKM untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan mereka, serta membantu dalam mengelola keuangan dengan lebih efisien. Studi yang dilakukan oleh Hertadiani dan Lestari (2021) menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh besar terhadap kinerja UMKM di sektor kuliner di Jakarta Timur, yang mana akses ke layanan keuangan resmi memberikan kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan kinerja dan bersaing di pasar. Adanya penemuan tersebut menunjukkan bahwa inklusi keuangan menjadi peran untuk meningkatkan kinerja UMKM. Dukungan yang diberikan pemerintah dapat meningkatkan inklusi keuangan oleh karena itu dukungan pemerintah berperan penting untuk mendukung inklusi keuangan. Penguatannya adalah dengan adanya studi yang dilaksanakan oleh Anggriani et al. (2023) menekankan bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung inklusi keuangan, seperti penyediaan pelatihan dan akses informasi, dapat meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Untuk mencapai kesuksesan yang maksimal, kolaborasi antara pemerintah, institusi keuangan, dan UMKM sangat penting dalam menghadapi hambatan yang ada dan memastikan pelaku UMKM dapat mengoptimalkan inklusi keuangan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H6:** Inklusi Keuangan (FI) berdampak positif terhadap kinerja UMKM melalui dukungan pemerintah (GS) sebagai mediasi.

### 2.2.7. Pengaruh Akses Permodalan terhadap kinerja UMKM melalui dukungan pemerintah sebagai mediasi

Akses permodalan terhadap kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui dukungan pemerintah sebagai perantara sangat diperlukan bagi UMKM untuk mengakses permodalan kinerja, ditambah dengan dukungan, kebijakan dan program pemerintah yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi untuk meningkatkan kinerjanya. Penelitian yang dilakukan oleh Riawan dan Kusnawan (2018) menunjukkan bahwa KUR memiliki pengaruh besar terhadap pendapatan yang diperoleh oleh UMKM, memberikan bukti bahwa sumber dana memiliki peran vital dalam meningkatkan hasil keuangan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yolanda (2024) menyatakan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam memberikan dukungan kepada UMKM melalui penyediaan akses ke sumber pembiayaan dan program pelatihan yang sesuai. Jika pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk program yang memudahkan akses pembiayaan, UMKM dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan kapasitas dan kinerjanya. Kemudahan dalam mengakses permodalan, dengan dukungan kebijakan pemerintah yang tepat, tidak hanya meningkatkan potensi UMKM untuk berkembang, tetapi juga mendukung pengelolaan keuangan yang lebih terencana dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hipotesis ketujuh dalam studi ini diidentifikasi sebagai:

**H7:** Akses Permodalan (AC) berdampak positif terhadap kinerja UMKM melalui dukungan pemerintah (GS) sebagai mediasi.

## 3. Metode Penelitian

Metode kuantitatif digunakan untuk menguji asumsi tentang dampak digitalisasi keuangan, inklusi keuangan, dan akses permodalan terhadap kinerja UMKM, dengan pemerintah berperan sebagai mediator. Penelitian ini dipilih karena sesuai untuk mengukur hubungan antar variabel dengan obyektif melalui pengumpulan data menggunakan kuesioner (Ghozali, 2006). Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah UMKM yang beroperasi di daerah Kota Pontianak. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Untuk menentukan ukuran sampel minimal, peneliti mengalikan jumlah variabel yang ada dengan jumlah pernyataan indikator, sehingga jumlah sampel minimal yang diperlukan adalah  $5 \times 24 = 120$  sampel.

Cara pengumpulan informasi yang diterapkan melibatkan kuesioner yang disebar melalui internet maupun secara langsung. Penyebaran kuesioner dilakukan mulai bulan Mei hingga Juli 2024. Penelitian ini menerapkan metode analisis data berupa pemodelan kesetaraan struktural berbentuk persegi (PLS-SEM). Metode ini bertujuan untuk mengungkap keterkaitan variabel-variabel dalam penelitian secara komprehensif.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Hasil Penelitian

#### 4.1.1. Model Pengukuran

Pertama, reliabilitas individual skala pengukuran ditentukan dengan menganalisis pemuatan indikator dalam hubungan reflektif. Nilai ambang batas yang dibutuhkan harus di atas 0,60 (Ghozali, 2006) dan idealnya di atas 0,70 (Hair et al., 2019). Selanjutnya, alfa Cronbach dan Reliabilitas Komposit (CR) digunakan untuk menilai reliabilitas konstruk. Alfa Cronbach merupakan ambang batas minimum, sedangkan CR merupakan ambang batas

maksimum untuk reliabilitas konsistensi internal. Nilai yang direkomendasikan adalah 0,70–0,90. (Hair et al., 2019). Tabel 1 menggambarkan tingkat konsistensi internal untuk semua konstruksi yang diterima.

**Tabel 1. Model Pengukuran**

Construct & Indicator	Loading Value
<i>Access to Capital (AC)</i>	
AC_1	0.721
AC_2	0.811
AC_3	0.851
AC_4	0.713
AC_5	0,665
AC_6	0.742
<i>Financial Digitalization (FD)</i>	
FD_1	0.806
FD_2	0.844
FD_3	0.845
FD_4	0.866
FD_5	0.760
<i>Government Support (GS)</i>	
G.S_1	0.838
G.S_2	0.857
G.S_3	0.847
G.S_4	0.843
<i>Financial Inclusion (FI)</i>	
F.I_1	0.880
F.I_2	0.817
F.I_3	0,865
F.I_4	0.816
<i>Performance of MSME ( P.MSME )</i>	
P.MSME_1	0.876
P.MSME_2	0.822
P.MSME_3	0,788
P.MSME_4	0.943
P.MSME_5	0,937

Setelah mengevaluasi reliabilitas, validitas konvergen diperiksa menggunakan AVE, yang harus lebih tinggi dari 0,5 (Fornell & Larcker, 1981).

**Table 2. Cronbach Alpha, CR & AVE**

Konstruksi dan Indikator	Cronbach Alpha	CR/Composite Reliability	AVE
Access to Capital (AC)	0.851	0.942	0,766
Financial Digitalization (FD)	0.882	0.914	0.681
Government Support (GS)	0,868	0.910	0.716
Financial Inclusion (FI)	0.866	0.909	0.714
Performance of MSME (P.MSME)	0.922	0.886	0,567

Semua nilai AVE untuk setiap konstruk melebihi 0,5, berada antara 0,567 hingga 0,766. Langkah selanjutnya adalah evaluasi validitas diskriminan menggunakan metode pengukuran Fornell-Larcker. Harus terpenuhi syarat bahwa akar kuadrat AVE dari setiap konstruk lebih besar daripada korelasinya dengan variabel laten lainnya, sesuai dengan penelitian Fornell

dan Larcker tahun 1981. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa AVE untuk setiap konstruk melebihi tingkat korelasi antar konstruk tersebut. Nilai yang diperoleh tetap di bawah ambang batas yang ditetapkan, memberikan bukti keandalan dan validitas (lihat Tabel 2).

**Tabel 3. Kriteria Fornell-Lacker**

Variabel	(1)AC	(2)FD	(3)GS	(4)FI	(5) P.MSME
AC	0.753				
FD	0,563	0,825			
GS	0.697	0,655	0.846		
FI	0.706	0.603	0.637	0.845	
P.MSME	0.833	0.730	0.816	0,766	0,875

Akurasi diagonal adalah gambaran dari nilai rata-rata yang diekstrak (AVE) dari setiap konstruksi, yang dicatat dengan huruf tebal, yang menunjukkan legitimasi diskriminatif. Pengambilan keuntungan dari Modal menunjukkan nilai akar kuadrat AVE sebesar 0,753. Digitalisasi Keuangan (FD) menunjukkan akar kuadrat AVE yang tinggi sebesar 0,825, dengan korelasi dengan variabel lain, seperti 0,563 dengan Akses terhadap Modal (AC) dan 0,697 dengan Dukungan Pemerintah (GS). Dukungan Pemerintah memiliki akar kuadrat AVE sebesar 0,846, yang menunjukkan validitas diskriminan yang kuat, dengan korelasi sebesar 0,655 dengan Digitalisasi Keuangan (FD) dan 0,706 dengan Inklusi Keuangan (FI). Inklusi Keuangan (FI) memiliki akar kuadrat nilai AVE sebesar 0,845 dan korelasi sebesar 0,637 dengan Dukungan Pemerintah (GS). Kinerja UMKM (P.MSME) menunjukkan akar kuadrat AVE sebesar 0,875, dengan korelasi tertinggi (0,833) dengan Akses terhadap Modal (AC). Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih tinggi daripada hubungannya dengan konstruk lain, menegaskan keabsahan model pengukuran diskriminan.

**4.1.2. Hasil Hipotesis**

Tabel 3 menunjukkan hasil penilaian hipotesis dengan uji satu sisi, yang sesuai untuk koefisien dengan tanda prediksi (positif atau negatif) (Kock, 2015).

**Tabel 4. Hasil Hipotesis**

Path/Relationship	Items	T Value	p-values	Support
FD → P.MSME	0.315	7.559	0.000	Ya
FI → P.MSME	0.224	3.633	0,001	Ya
AC → P.MSME	0.498	8.224	0.000	Ya
GS → P.MSME	0.229	5.342	0.000	Ya
FD → GS → P.MSME	0.102	3.759	0.000	Ya
FI → GS → P.MSME	0,045	1.775	0,079	Tidak
AC → GS → P.MSME	0.119	3.581	0.000	Ya

Penelitian menemukan bahwa implementasi digitalisasi dalam pengelolaan keuangan (*Financial Digitalization*) memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap produktivitas UMKM. Nilai koefisien  $\beta$  sebesar 0,315, nilai uji T sebesar 7,559, dan signifikansi  $\rho$  sebesar 0,000 menunjukkan bahwa hal ini sangat penting dalam meningkatkan kinerja bisnis skala kecil dan menengah (Hair & Sarstedt, 2019). Ini menunjukkan bahwa ketika tingkat digitalisasi keuangan semakin tinggi, performa UMKM juga semakin baik. Secara tambahan, keterlibatan keuangan juga memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, dengan angka  $\beta$  sebesar 0,224, nilai T sebesar 3,633, dan angka  $\rho$  sebesar 0,001. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan keterlibatan keuangan dapat meningkatkan

performa UMKM. Ketiga, pengaruh modal terhadap kinerja UMKM sangat besar, dengan  $\beta$  sebesar 0,498, nilai T sebesar 8,224, dan  $\rho$  sebesar 0,000, yang menunjukkan bahwa meningkatnya akses terhadap modal dapat signifikan memperbaiki kinerja UMKM. Terlebih lagi, bantuan dari pemerintah telah terbukti memiliki dampak positif terhadap kinerja UMKM, dengan nilai  $\beta$  sebesar 0,229, nilai T sebesar 5,342, dan nilai  $\rho$  sebesar 0,000, membuktikan bahwa dukungan dari pemerintah adalah faktor penting untuk meningkatkan kinerja UMKM.

Uji mediasi menandakan bahwa teknologi keuangan yang didukung oleh pemerintah berpengaruh besar terhadap hasil bisnis UMKM, dengan koefisien beta sebesar 0,102, angka T sebesar 3,759, dan angka rho sebesar 0,000. Dengan cara yang sama, kinerja UMKM dipengaruhi secara signifikan oleh akses terhadap Modal yang disokong oleh pemerintah, dengan koefisien  $\beta$  mencapai 0,119, nilai T sebesar 3,581, dan nilai  $\rho$  sebesar 0,000. Kedua temuan ini menegaskan bahwa dukungan pemerintah memperkuat dampak digitalisasi keuangan dan akses terhadap Modal terhadap kinerja UMKM. Di sisi lain, data tidak mendukung efek positif Inklusi keuangan yang dimediasi oleh dukungan pemerintah terhadap kinerja UMKM. Analisis menunjukkan nilai  $\beta$  sebesar 0,045, nilai T sebesar 1,775, dan nilai  $\rho$  sebesar 0,079, di atas nilai batas 0,05 (Hair et al., 2017). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah tidak cukup kuat untuk memediasi dampak Inklusi Keuangan terhadap kinerja UMKM secara signifikan.

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Digitalisasi keuangan berdampak positif terhadap kinerja UMKM melalui dukungan pemerintah sebagai mediator

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah dapat memediasi dampak digitalisasi keuangan (FD) terhadap kinerja UMKM (P.MSME). Digitalisasi keuangan dapat secara langsung meningkatkan kinerja UMKM, seperti penggunaan teknologi digital dalam transaksi dan pengelolaan keuangan. Namun, dampak tersebut menjadi lebih kuat apabila ada dukungan pemerintah, seperti kebijakan yang mendorong adopsi teknologi digital, pelatihan, atau bantuan keuangan untuk penerapan teknologi. Dengan dukungan tersebut, UMKM tidak hanya lebih mudah mengadopsi teknologi digital, tetapi juga lebih siap memanfaatkannya untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mengakses pasar yang lebih luas, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Hasil tersebut menggarisbawahi pentingnya kontribusi pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang komprehensif bagi UMKM untuk menjalani transformasi digital dan mengoptimalkan potensi mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Pemerintah telah menggalakkan pembayaran nontunai sebagai bukti nyata penerapan digitalisasi di sektor perdagangan. Pembayaran nontunai ini telah meningkatkan efisiensi transaksi dan mengurangi biaya operasional, sehingga memungkinkan UMKM lebih fokus pada pengembangan bisnis.

### 4.2.2. Inklusi Keuangan berdampak positif terhadap kinerja UMKM melalui dukungan pemerintah sebagai mediator

Dukungan pemerintah (GS) tidak dapat secara signifikan memediasi dampak Inklusi keuangan (FI) terhadap kinerja UMKM (P.MSME). Artinya, meskipun Inklusi keuangan, seperti akses UMKM terhadap layanan keuangan, termasuk pinjaman, tabungan, dan pembayaran digital, dapat secara langsung meningkatkan kinerja UMKM, intervensi atau dukungan pemerintah belum berhasil memperkuat atau memediasi pengaruh ini. Penelitian terkini menunjukkan bahwa banyak program pemerintah mungkin terlalu umum atau tidak disesuaikan dengan kebutuhan spesifik UMKM di berbagai sektor atau wilayah (Akbar & Adi,

2022). Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan UMKM juga dapat menghambat mereka memanfaatkan dukungan pemerintah secara efektif.

Meskipun pemerintah telah berupaya memperluas akses layanan keuangan melalui berbagai inisiatif, seperti program digitalisasi dan subsidi suku bunga, hasilnya belum cukup untuk memediasi hubungan antara inklusi keuangan dan kinerja UMKM (Lutfi et al., 2022). Banyak UMKM masih kesulitan mengakses layanan keuangan formal meskipun ada dukungan kebijakan karena hambatan seperti kurangnya pengetahuan tentang layanan yang tersedia atau persyaratan administratif yang rumit (OECD, 2023).

Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan khusus UMKM, serta pentingnya peningkatan literasi keuangan di kalangan pemilik usaha kecil dan menengah untuk memastikan bahwa dukungan pemerintah dapat lebih efektif memediasi dampak Inklusi Keuangan terhadap kinerja UMKM (Medhika et al., 2018). Inklusi Keuangan mungkin tidak sepenuhnya dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja UMKM di Indonesia tanpa pendekatan yang lebih tepat sasaran.

#### **4.2.3. Akses terhadap Modal berdampak positif terhadap kinerja UMKM melalui dukungan pemerintah sebagai mediator**

Penelitian ini menemukan bahwa dampak akses permodalan (AC) terhadap kinerja UMKM (P.MSME) dapat diperkuat melalui dukungan pemerintah (GS). Teori Dukungan Kelembagaan memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa lingkungan kelembagaan, termasuk intervensi pemerintah, memegang peranan penting dalam memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya (Mutoharoh & Buyong, 2020). Dukungan pemerintah, seperti subsidi bunga, penjaminan kredit, dan program pembiayaan UMKM, menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi UMKM untuk mengakses permodalan (Lutfi et al., 2022). Hal ini memungkinkan UMKM memperoleh modal dengan persyaratan yang lebih baik, seperti suku bunga yang lebih rendah atau persyaratan yang lebih mudah diakses, sehingga memungkinkan mereka menggunakan modal tersebut secara lebih efisien untuk pengembangan bisnis.

Teori *Resource-Based View* (RBV) memberikan dasar untuk memahami mengapa akses terhadap Modal sangat penting bagi kinerja UMKM. RBV menyatakan bahwa akses terhadap sumber daya yang berharga, langka, dan tak ada duanya, seperti Modal, merupakan faktor kunci yang memungkinkan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja mereka (Barney & Arian, 2005).

Dukungan ini membantu UMKM menghadapi tantangan dalam mengakses Permodalan, seperti hambatan administratif atau risiko tinggi yang kerap menjadi kendala signifikan di sektor ini. Studi ini menegaskan bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk dukungan kelembagaan sangat penting untuk memaksimalkan dampak positif akses Permodalan terhadap kinerja UMKM (Septiani & Wuryani, 2020). Dukungan pemerintah memperluas akses UMKM terhadap sumber daya yang dibutuhkan dan memastikan Permodalan yang diperoleh dapat dioptimalkan untuk pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Tanpa dukungan ini, potensi penuh akses Permodalan untuk meningkatkan kinerja UMKM tidak dapat terwujud.

## **5. Kesimpulan**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah (GS) dapat memediasi dampak digitalisasi keuangan (FD) dan akses terhadap Modal (AC) pada kinerja UMKM (P.MSME). UMKM tidak hanya merasa lebih mudah untuk mengadopsi teknologi digital, tetapi mereka juga dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya,

dan mengakses pasar yang lebih luas, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Dukungan pemerintah memperluas akses UMKM terhadap sumber daya yang mereka butuhkan dan memastikan bahwa Modal yang diperoleh dapat dioptimalkan untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Namun, dukungan pemerintah tidak dapat memediasi dampak Inklusi keuangan pada kinerja UMKM. Meningkatkan koordinasi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan spesifik UMKM dan meningkatkan literasi keuangan di antara pemilik usaha kecil dan menengah penting untuk memastikan bahwa dukungan pemerintah dapat lebih efektif memediasi dampak Inklusi keuangan pada kinerja UMKM.

## 6. Daftar Pustaka

- Adita, S., Irmadariyani, R., & Shulthoni, M. (2021). Pengaruh Pengungkapan Shari'Ah Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Effect of Disclosure of Shari'Ah Corporate Social Responsibility on Financial Performance. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 19(1), 47–62.
- Akbar, R., & Adi, R. (2022). Moderating effect of government regulations on the effect of entrepreneurship orientation on the performance MSME. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 108–116.
- Almaidah, S., & Endarwati, T. (2019). Analisis pengaruh karakteristik wirausaha, modal, motivasi, pengalaman, dan kemampuan usaha terhadap keberhasilan usaha pada UKM penghasil mete di kabupaten wonogiri. *EDUSAINTEK*, 3.
- Anggriani, I., Armiani, A., & Wahyullah, M. (2023). Pengaruh Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan, dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Dompur. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(3), 598–609.
- Barney, J. B., & Arian, A. M. (2005). The resource-based view: origins and implications. *The Blackwell Handbook of Strategic Management*, 123–182.
- Dasuki, R. E. (2021). Manajemen strategi: kajian teori resource based view. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 21(3). <https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i3.710>
- Fajriah, A. A., & Himawati, D. (2023). Pengaruh Modal Manusia, Orientasi Pasar dan Inovasi terhadap Kinerja Pemasaran UMKM di Desa Wisata Situs Cagar Budaya Gunung Padang, Cianjur Jawa Barat. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 7(1), 53–64.
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39–50.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gosal, G. G., & Nainggolan, R. (2023). The influence of digital financial literacy on Indonesian SMEs' financial behavior and financial well-being. *International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev.*, 8(12), 11.
- Hair, J. F., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). Rethinking some of the rethinking of partial least squares. *European Journal of Marketing*, 53(4), 566–584.
- Hair Jr, J. F., Matthews, L. M., Matthews, R. L., & Sarstedt, M. (2017). PLS-SEM or CB-SEM: updated guidelines on which method to use. *International Journal of Multivariate Data Analysis*, 1(2), 107–123.
- Hair Jr, J. F., & Sarstedt, M. (2019). Factors versus composites: Guidelines for choosing the right structural equation modeling method. *Project Management Journal*, 50(6), 619–624.
- Hasanudin, H., & Panigfat, F. (2024). Unlocking MSME Performance: The Interplay of Financial Literacy, Financial Inclusion, and Financial Technology Lending with Venture Capital Mediation. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 9(2), 169–180.

- Hendratmoko, H. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja UMKM di Indonesia. *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship (JOBS)*, 2(1), 50–65.
- Hertadiani, V. W., & Lestari, D. (2021). Pengaruh inklusi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Jakarta Timur. *KALBISOCIO Jurnal Bisnis Dan Komunikasi*, 8(2), 19–31.
- Hidayat, M. T., Ramli, A., & Hasan, M. (2024). The Influence of Entrepreneurial Literacy and Digital Literacy on Business Success (A Study on SMEs Assisted by the Department of Cooperatives in Biringere Village, North Sinjai District, Sinjai Regency). *TRANSEKONOMIKA: AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN*, 4(5), 936–949. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v4i5.757>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2023). *Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Siaran Pers HM.
- Khotimah, H., & Budi, S. (2020). Analisis peran inovasi, kompetensi akuntansi, dan dukungan pemerintah terhadap daya saing UMKM Kota Tangerang Selatan. *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 117–130.
- Kilay, A. L., Simamora, B. H., & Putra, D. P. (2022). The Influence of E-Payment and E-Commerce Services on Supply Chain Performance: Implications of Open Innovation and Solutions for the Digitalization of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(3), 119. <https://doi.org/10.3390/joitmc8030119>
- Kock, N. (2015). Common method bias in PLS-SEM: A full collinearity assessment approach. *International Journal of E-Collaboration (Ijec)*, 11(4), 1–10.
- Kristiawati, E., & Malini, H. (2024). The Role of Financial Literacy and Entrepreneurial Orientation on MSME Sustainability: The Mediating Effect of E-Commerce. *AJARCDE (Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment)*, 24–30.
- Kumar, R., Singh, R. K., & Dwivedi, Y. K. (2020). Application of industry 4.0 technologies in SMEs for ethical and sustainable operations: Analysis of challenges. *Journal of Cleaner Production*, 275, 124063.
- Lutfi, A., Alkelani, S. N., Al-Khasawneh, M. A., Alshira'h, A. F., Alshirah, M. H., Almaiah, M. A., Alrawad, M., Alsyouf, A., Saad, M., & Ibrahim, N. (2022). Influence of digital accounting system usage on SMEs performance: The moderating effect of COVID-19. *Sustainability*, 14(22), 15048.
- Manne, F. (2022). Praktik Digitalisasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Umkm Di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Business and Management*, 5(1), 173–177.
- Medhika, N. G. A. J., Giantari, I. G. A. K., & Yasa, N. N. K. (2018). Peran Keunggulan Bersaing Dalam Memediasi Orientasi Pasar Dan Orientasi Kewirausahaan Dengan Kinerja UKM. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 1(2), 183–195.
- Mutoharoh, W., & Buyong, S. Z. (2020). MSME's Performance—in the Effect of Accounting Digitization. *ICIC 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Islamic Civilization, ICIC 2020, 27th August 2020, Semarang, Indonesia*, 209.
- Novitasari, S. P., Ak, M., & Hastuti Redyanita, S. S. (2022). Analisis Pengaruh Literasi Akuntansi, Perpajakan Dan Financial Capital Terhadap Kinerja Umkm Di Kabupaten Bogor. *Ekonomi & Bisnis*, 21(2).
- Purwantini, A. H., & Amalia, R. D. (2021). Investigasi niat penggunaan financial technology payment bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 19(1), 35–46.
- Riawan, R., & Kusnawan, W. (2018). Pengaruh Modal Sendiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha (Studi Pada UMKM di Desa Platihan Kidul Kec. Siman). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(01), 31–37.

- Risal, R., Wulandari, R., & Widyastuti, R. D. (2019). Faktor Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)*, 8(1), 125–134.
- Salam, M. D., & Prathama, A. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Umkm. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 137–143.
- Sanga, B., & Aziakpono, M. (2024). FinTech developments and their heterogeneous effect on digital finance for SMEs and entrepreneurship: evidence from 47 African countries. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*.
- Sani, A., Khristiana, Y., Zailani, A. U., & Husain, T. (2020). E-business adoption models in organizational contexts on the TAM extended model: A preliminary assessment. *2020 8th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM)*, 1–5.
- Septiani, R. N., & Wuryani, E. (2020). *Pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Sidoarjo*. Udayana University.
- Setiawan, A., Sari, W., Afif, A., Yahya, R. F., & Mayasafitri, R. (2024). Implementation of SAK E-MKM: Key Factor in Improving MSME Performance. *Jurnal Akuntansi*, 16(1), 183–194.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), 33–64.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86.
- Sun, J., & Zhang, J. (2024). Digital financial inclusion and innovation of MSMEs. *Sustainability*, 16(4), 1404.
- Suryaningrum, D. A., & Utami, E. Y. (2024). Analisis Kualitas Layanan Koperasi, Dukungan Pemerintah Daerah, Keterlibatan Masyarakat dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 2(02), 157–167.
- Tarigan, Z. N. A. B., Dewi, F. N., & Pribadi, Y. (2022). Keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah di masa pandemi: Dukungan kebijakan pemerintah. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 15(1), 12–23.
- Tay, L.-Y., Tai, H.-T., & Tan, G.-S. (2022). Digital financial inclusion: A gateway to sustainable development. *Heliyon*, 8(6).
- Trianto, B., Rahmayati, R., Yuliaty, T., & Sabiu, T. T. (2021). Determinant factor of Islamic financial inclusiveness at MSMEs: Evidence from Pekanbaru, Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 105–122.
- Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. *Strategic Management Journal*, 5(2), 171–180. <https://doi.org/10.1002/smj.4250050207>
- Wijaya, R., & Hamdi, K. (2023). Digitalisasi Keuangan Menuju Smart Umkm Ladu Mutia Di Kota Pariaman. *ASAWIKA: Media Sosialisasi Abdimas Widya Karya*, 8(2), 1–8.
- Yolanda, C. (2024). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186.